



LAMPUNG SAI

SEPTEMBER 2021 EDISI 9



TOPIK UTAMA

Divisi Pemasyarakatan Kanwil
Lampung Gelar Koordinasi
DILKUMJAKPOL Plus



LIPUTAN KHUSUS

Walikota Bandar Lampung Cek
Langsung Seleksi Kompetensi
Dasar CAT CASN Kemenkumham
Tahun Anggaran 2021



5 PESAN MENKUMHAM

Prof. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D.



- 1 **Utamakan Akuntabilitas
kedepankan Integritas**
- 2 **Bangun Sinergitas serta
manajemen organisasi
yang sehat dan cerdas**
- 3 **Jabatan adalah amanah,
terima dengan tanggung-
jawab dan tinggalkan
jejak yang baik**
- 4 **Kuasai pengelolaan dan
penggunaan anggaran
sesuai prinsip akunta-
bilitas dan transparansi**
- 5 **Perkuat sinergi dan
kolaborasi internal serta
bangun kerjasama tim
yang baik**

bangga
melayani
bangsa

KAMI ASN KEMENKUMHAM

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI

➤ Berorientasi Pelayanan

1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Ramah, Cekatan, Solutif dan dapat Diandalkan.
3. Melakukan perbaikan tiada henti.

➤ Akuntabel

1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi.
2. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan

➤ Kompeten

1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
2. Membantu orang lain belajar.
3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

➤ Harmonis

1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
2. Suka menolong orang lain.
3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

➤ Loyal

1. Memegang teguh ideologi Pancasila, UUD NKRI tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah.
2. Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi & Negara.
3. Menjaga Rahasia jabatan & negara.

➤ Adaptif

1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
2. Terus berinovasi & mengembangkan kreativitas.
3. Bertindak proaktif.

➤ Kolaboratif

1. Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
2. Terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah.
3. Menggerakkan Pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.



Sekapur Sirih

Assalamualaikum Wr. Wb.,
Salam Sejahtera untuk kita semua,
Tabik pun...

Puji dan syukur marilah kita senantiasa sampaikan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan untuk dapat bekerja dan berkontribusi untuk negara.

Pada bulan ini, semangat calon tunas-tunas integritas mewarnai kegiatan seleksi penerimaan CPNS Tahun 2021. Proses seleksi dengan sistem CAT (Computer Assisted Test) dilaksanakan sebagai modal dasar untuk menciptakan ASN yang bersih dari KKN dengan SDM yang berkualitas. Sebagai Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, saya menekankan kepada masyarakat untuk tidak mempercayai pihak-pihak manapun yang menawarkan untuk meluluskan secara instan. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia terus melakukan perbaikan sistem untuk mencetak tunas-tunas Integritas yang berkualitas sehingga mampu mengembangkan Kementerian Hukum dan HAM semakin PASTI dalam melayani masyarakat dan Negeri Indonesia tercinta ini.

Selain itu, untuk mendukung kinerja Kementerian Hukum dan HAM RI, Kanwil Kemenkumham Lampung pada bulan ini juga terus melakukan koordinasi dan bersinergi dengan instansi terkait. Kami juga akan terus meningkatkan edukasi dan pelayanan masyarakat khususnya bidang Kekayaan Intelektual sebagai wujud dukungan terhadap safari paten yang telah diselenggarakan oleh DJKI pada bulan ini.

Akhir kata Wabillahi taufiq wal hidayah,
Wassalamualaikum Wr. Wb.
Salam Pembaharuan!



IWAN SANTOSO

Plt. KAKANWIL KEMENKUMHAM LAMPUNG

PELINDUNG

Plt. Kepala Kantor Wilayah
IWAN SANTOSO

PENGARAH

Kepala Divisi Administrasi
IDA ASEP SOMARA

Kepala Divisi Yankum dan HAM
NUR ICHWAN

Kepala Divisi Keimigrasian
IS EDY EKOPUTRANTO

Kepala Divisi Pemasaryakatan
FARID JUNAEDI

PENANGGUNGJAWAB

Kepala Bagian Program dan Humas
BASNAMARA

PEMIMPIN REDAKSI

Kasubag Humas RB & TI
ARLISA NOVIRIANTONO

EDITOR

ARLISA NOVIRIANTONO, DAMBA WIRATAMA, REZA KHAIRUL FITRA, PIJAR PUTRA ARINDA, RIZQI DHITA WARDHA-NIK, NABIL AN NAFIS

FOTOGRAFER, REDAKSI DAN BERITA

ARLISA NOVIRIANTONO, DAMBA WIRATAMA, REZA KHAIRUL FITRA, PIJAR PUTRA ARINDA, RIZQI DHITA WARDHA-NIK, NABIL AN NAFIS

LAYOUT & DESAIN GRAFIS

NABIL AN NAFIS

Dari Redaksi



Assalamualaikum Wr. Wb

Tabik pun...

Kami segenap redaksi E-Buletin Lampung Sai Menyampaikan puji syukur kepada Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat berupa kesehatan sehingga kami dapat menerbitkan E-Buletin Lampung Sai edisi ke-09 ini dengan lancar.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Plt. Kepala Kantor Wilayah, Pejabat Tinggi Pratama dan semua pihak yang telah mendukung tim redaksi untuk berkarya serta terus-menerus melakukan inovasi dan pembaharuan.

Pada edisi E-Buletin yang ke-09 ini, kami telah merangkum kegiatan Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung dan Unit Pelaksana Teknis selama satu bulan terakhir. Dalam edisi kali ini, kami menyajikan liputan khusus mengenai semarak SKD penerimaan CPNS di lingkungan Kemenkumham Lampung tahun 2021. Adapun Topik Utama pada edisi ini adalah Safari Paten DJKI yang digelar bersama Kanwil Kemenkumham Lampung yang merupakan penutup perjalanan Safari Paten DJKI. Selain itu, masih banyak liputan-liputan menarik lainnya yang kami rangkum dalam E-Buletin Lampung Sai edisi ke-09 ini.

Kami segenap redaksi mohon maaf apabila terdapat kesalahan tulisan. Semangat pembaharuan akan selalu mengiringi langkah tim redaksi untuk terus melakukan inovasi. Untuk itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca akan selalu kami terima dengan sambutan hangat agar E-Buletin Lampung Sai semakin baik dan semakin PASTI. Salam Pembaharuan! Lampung Sai Pasti Kece! Pasti WBK!

Tim Redaksi.



Daftar Isi

23



LIPUTAN KHUSUS

SKD Penerimaan CPNS di Lingkungan Kemenkumham Lampung TA. 2021 Resmi digelar

30



TOPIK UTAMA

Divisi Pemasyarakatan Kanwil Lampung Gelar Koordinasi DILKUMJAKPOL Plus

08



Gandeng Pengwil INI, Kanwil Lampung Gelar Talkshow Sosialisasi Peningkatan Pelaporan Beneficial Ownership

10



Kanwil Lampung Gelar Sosialisasi Pendaftaran Perseroan Perseorangan Secara Virtual

12



Pendampingan SPIP, MR, dan PMPZI, Kanwil Hadirkan Narasumber BPKP dan Inspektorat Jenderal

15



Kejaksaaan Tinggi Lampung dan Itjen Kemenkumham Berikan Penguatan Pengendalian Pungutan Liar dan Gratifikasi di Kanwil Lampung

18



Kadivim Pimpin Operasi Gabungan TIMPORA Bersama Korem 043 Gatam, BIN, Polda Lampung, dan Kejati Lampung

19



Gelar Safari Paten, Kanwil Kemenkumham Lampung Jadi Penutup Perjalanan DJKI



22

Jelang Pelaksanaan CAT BKN, Plt. Kakanwil Lampung Lakukan Koordinasi dengan Polda dan UPT BKN



23

SKD Penerimaan CPNS di Lingkungan Kemenkumham Lampung TA. 2021 Resmi digelar



26

Hari Terakhir Pelaksanaan, Walikota Cek Langsung SKD CAT Kemenkumham TA. 2021



28

Plt. Kakanwil Hadiri Ikrar Sumpah Setia WBP Eks Teroris Kepada NKRI dan Deklarasi BERSINAR Lapas Kelas I Bandar Lampung



30

Divisi Pemasarakan Kanwil Lampung Gelar Koordinasi DILKUMJAKPOL Plus



33

Kanwil Lampung Gelar Harmonisasi Raperbup Kabupaten Tulang Bawang Barat Tentang Pemberian Insentif Pengelola BMN



34

Kanwil Lampung Gelar Bimtek Perancangan Peraturan Daerah Tahun 2021



36

Kanwil Lampung Gelar Koordinasi Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM dan Kabupaten/Kota Peduli HAM



37

Plt. Kakanwil Dampingi Deputi III KSP dalam Kunjungan Kerja di Provinsi Lampung



39

Plt. Kakanwil Tinjau Pelayanan Keimigrasian di Bandara Internasional Radin Inten II



40

Dialog Interaktif di Radar TV, Kemenkumham dan Dinas Pariwisata Provinsi Lampung Bahas KIK dan WBTB



42

Hadirkan Pakar Kesehatan Kemenkumham Lampung Kaji Pelanggaran HAM terhadap ODGJ



Gandeng Pengwil INI, Kanwil Lampung Gelar Talkshow Sosialisasi Peningkatan Pelaporan Beneficial Ownership

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Nur Ichwan hadir sebagai Narasumber dalam acara live - Talkshow berjudul Sosialisasi Peningkatan Pelaporan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) bertempat di studio Radar Lampung pada hari ini, Rabu (08/09/2021).



Turut hadir sebagai Narasumber yaitu Ketua Pengwil Lampung Ikatan Notaris Indonesia, Zul April.

Selain Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, hadir pula sebagai Narasumber yaitu Ketua Pengwil Lampung Ikatan Notaris Indonesia, Zul April. Dalam kesempatan ini, Nur Ichwan menjelaskan mengenai Permenkumham nomor 9 Tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Selain itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM juga menjelaskan tentang ruang lingkup pelaporan oleh notaris yaitu Identifikasi Pengurus Jasa, Verifikasi Pengguna Jasa dan Pemanfaatan Transaksi Pengguna Jasa. Zul April menambahkan bahwa pelaksanaan Permenkumham No 9 Tahun 2017 dari sudut pandang notaris, sebelumnya harus sudah memahami definisi dan perbedaan dari Korporasi dan Beneficial Ownership.

Penerapan kebijakan pelaporan Pemilik Manfaat/Beneficial Ownership ini merupakan upaya pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan terorisme sebagai tindak lanjut diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013

Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU TPPT). Hal ini dikarenakan, Korporasi banyak digunakan oleh oknum-oknum tertentu sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, bahkan menghindari pajak. Berdasarkan standar internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, perlu adanya pengaturan dan mekanisme untuk mengenali pemilik manfaat dari suatu korporasi guna memperoleh informasi mengenai pemilik manfaat yang akurat, terkini, dan tersedia untuk umum. Dengan pelaporan Pemilik Manfaat, akan memudahkan untuk mengungkap/mengidentifikasi siapa penerima manfaat yang sebenarnya dari suatu korporasi tersebut. Sehingga Aparat Penegak Hukum akan lebih mudah untuk melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Melalui Sosialisasi Peningkatan Pelaporan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) ini diharapkan masyarakat luas khususnya notaris telah memahami mengenai Pemilik Manfaat dan penerapan Peraturan-Peraturan yang berlaku dan dapat turut mengawal pelaksanaannya untuk memberantas Tindak Pidana Pencucian

Uang dan Tindak Pidana Pendanaan terorisme. Sehingga dapat tercapai transparansi mengenai pemilik manfaat dari korporasi yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan investasi pada korporasi di Indonesia. Hal ini akan membuat iklim investasi di Indonesia semakin baik dan tingkat perekonomian semakin meningkat. •

Melalui Sosialisasi Peningkatan Pelaporan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) ini diharapkan masyarakat luas khususnya notaris telah memahami mengenai Pemilik Manfaat dan penerapan Peraturan-Peraturan yang berlaku dan dapat turut mengawal pelaksanaannya untuk memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan terorisme.





Kanwil Lampung Gelar Sosialisasi Pendaftaran Perseroan Perseorangan Secara Virtual

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung gelar sosialisasi pendaftaran perseroan perseorangan pada hari ini, Selasa (14/09/2021) live dari studio Graha Pena Radar Lampung. Hadir sebagai narasumber adalah Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Ignatius Mangantar Tua dan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda, Gunawan. Pada Kesempatan ini Kabid Pelayanan Hukum menjelaskan bahwa Perseroan Perseorangan ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk mendukung pertumbuhan iklim bisnis dan kemudahan berbisnis atau EODB (Ease of Doing Business) di Indonesia.



Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Ignatius Mangantar Tua menjelaskan Perseroan Perseorangan ini ditujukan untuk pemilik usaha kecil dan mikro dengan berdasar pada Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020



Perseroan Perseorangan ini ditujukan untuk pemilik usaha kecil dan mikro dengan berdasar pada Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 Khususnya Pasal 109 yang mengubah UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Ignatius juga menjelaskan bahwa Pebisnis dapat mendaftarkan usahanya menjadi Perseroan Perseorangan dengan ketentuan Pemilik Saham dan Pendiri harus berjumlah satu orang dengan minimal usia 17 Tahun, Pendiri harus berstatus WNI, dan usaha yang didaftarkan termasuk kedalam kategori usaha kecil atau mikro dengan maksimal modal usaha sebesar 5 Milyar.

Gunawan juga turut menjelaskan mengenai dokumen yang harus dipersiapkan dan langkah-langkah pendaftaran Perseroan Perseorangan yang dapat dilakukan mandiri secara online

melalui laman web ahu.go.id dengan biaya PNBP sebesar 50.000 rupiah saja. Usaha yang didaftarkan menjadi Perseroan Perseorangan memiliki keunggulan memiliki tanggungjawab terbatas sehingga memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha dengan adanya pemisahan kekayaan pribadi dengan perusahaan. Selain itu proses pendirian juga lebih mudah, tidak memerlukan akta notaris, jumlah modal tergantung pemilik, pengelolaan internal tidak rumit, kemudahan akses pembiayaan dari perbankan, dan pembayaran pajak lebih murah.

Pendaftaran Badan Usaha menjadi Perseroan Perseorangan tidak menggantikan surat-surat izin legal lainnya. Pemilik usaha masih tetap harus mendapatkan surat izin usaha dan lainnya sesuai dengan peraturan pemerintah

Dengan adanya Perseroan Perseorangan ini, diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

daerah setempat.

Dengan adanya Perseroan Perseorangan ini, diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional. •



Pendampingan SPIP, MR, dan PMPZI, Kanwil Hadirkan Narasumber BPKP dan Inspektorat Jenderal

Dalam rangka Kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pendampingan Penerapan Manajemen Risiko (MR), dan Pendampingan PMPZI pada Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Tahun Anggaran 2021. Senin (14/09/2021) Kantor Wilayah Lampung menggelar Kegiatan Penguatan dengan narasumber dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung dan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM



Suharyanto selaku Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan IPP pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung yang menjelaskan tentang Manajemen Risiko.



Bertempat di Aula Kantor Wilayah Lampung, Plt. Kepala Kantor Wilayah, Iwan Santoso memberikan sambutan dan sekaligus membuka secara resmi Kegiatan. Turut hadir secara langsung, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan bersama dengan Kepala Bagian Program dan Humas, Basnamara, serta 52 Peserta dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan dan Keimigrasian di Jajaran Kantor Wilayah Lampung. Sedangkan diwaktu yang bersamaan kegiatan yang digelar juga secara Virtual Zoom Meeting ini turut dihadiri oleh Para Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas di Lingkungan Kanwil Lampung dan Para Kepala UPT di Jajaran Kanwil Lampung.

Iwan Santoso menjelaskan bahwa Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak dapat dilepaskan dari implementasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dan Pembangunan Zona Integritas.

Iwan Santoso berharap kepada seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung untuk terus berkomitmen dan terus berproses

dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di satuan kerja masing-masing.

Kegiatan dilanjutkan dengan materi dari Suharyanto selaku Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan IPP pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung yang menjelaskan tentang Manajemen Risiko.

Suharyanto menjelaskan tentang Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko, Penetapan struktur analisis risiko, Penetapan kriteria penilaian risiko, dan penetapan struktur pengelolaan risiko.

“Tata Kelola pemerintah yang lebih akuntabel dan transparan akan dapat dicapai jika seluruh jajaran pimpinan instansi pemerintah menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban secara tertib, terkendali, efektif dan efisien.” Ujar Iwan Santoso

“Dalam penerapan pengelolaan risiko, terdapat dua hal penting yang perlu menjadi perhatian yaitu pembangunan/ perbaikan Lingkungan Pengendalian yang mendukung penciptaan budaya dan sistem pengelolaan risiko, dan implementasi unsur Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan menunjukkan pelaksanaan proses pengelolaan risiko.” Jelas Suharyanto.

Selanjutnya, Priyanto selaku Auditor Madya pada





Perwakilan BPKP Provinsi Lampung menjelaskan tentang prinsip-prinsip manajemen risiko, dimana prinsip manajemen risiko harus dipegang oleh organisasi agar penerapan manajemen risiko dapat berjalan dengan efektif. Sedangkan Kerangka kerja manajemen risiko yang bertujuan untuk membantu organisasi mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam keseluruhan sistem manajemen organisasi.

“Proses manajemen risiko meliputi lima kegiatan, yaitu, menentukan konteks, mengidentifikasi risiko, menganalisis risiko, mengevaluasi risiko, memperlakukan risiko, mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan, memantau dan mereviu” ujar Priyanto

Hadir secara Virtual Zoom, Materi terakhir oleh Hari Purwanto dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM memberikan penguatan terkait dengan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI). Hari menjelaskan bahwa di akhir tahun akan dilaksanakan responden oleh Kementerian PAN-RB, survei ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan responden dari pelayanan publik yang dilaksana-

“**Proses manajemen risiko meliputi lima kegiatan, yaitu, menentukan konteks, mengidentifikasi risiko, menganalisis risiko, mengevaluasi risiko, memperlakukan risiko, mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan, memantau dan mereviu”** ujar Priyanto

kan di masing-masing Unit Kerja.

Hari juga meminta dalam persiapan kita menghadapi desk evaluasi yang akan dilaksanakan oleh Tim Penilai Nasional (TPN), diharapkan Satuan Kerja dapat membuat video profil, pemaparan, dan juga sarana dan pra sarana sesuai dengan inovasi dan perubahan yang telah dilakukan, Menutup penguatan, Hari memberikan motivasi kepada para peserta untuk terus berinovasi dengan terus meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Kegiatan Monitoring dan Eva-

luasi atas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pendampingan Penerapan Manajemen Risiko (MR), dan Pendampingan PMPZI ini ditutup dengan beberapa pertanyaan dari para peserta kepada narasumber.



Kejaksaan Tinggi Lampung dan Itjen Kemenkumham Berikan Penguatan Pengendalian Pungutan Liar dan Gratifikasi di Kanwil Lampung

Dalam rangka mendukung tercapainya Aparatur Sipil Negara yang Amanah, Transparan, Akuntabel, Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung mengadakan Kegiatan Penguatan Unit Pengendalian Pungutan Liar dan Gratifikasi secara langsung dan Virtual Zoom Meeting dengan narasumber dari Kejaksaan Tinggi Lampung dan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Rabu (15/09/2021)



Iwan Santoso menjelaskan dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance), diperlukan zero tolerance atas Tindak Pidana Korupsi.

“

**“Saya juga berharap melalui penguatan Unit Pengendalian Pungli dan Gratifikasi hari ini, dapat terbangun Budaya Anti Korupsi dan integritas yang tinggi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM”
Tegas Iwan Santoso.**

”



Amrullah selaku Jaksa Madya pada Kejaksaan Tinggi Lampung memberikan materi kepada peserta

Bertempat di Aula Kantor Wilayah Lampung, Plt. Kepala Kantor Wilayah, Iwan Santoso didampingi secara langsung oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Farid Junaedi dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan serta Para Pimpinan Tinggi Pratama, Para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas di Kantor Wilayah Lampung dan Para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jajaran Kantor Wilayah Lampung yang hadir secara Virtual Zoom Meeting.

Dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan, Iwan Santoso menjelaskan dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance), diperlukan zero tolerance atas Tindak Pidana Korupsi.

“Untuk itu diperlukan pengaturan atas pemberian dan penerimaan hadiah/gratifikasi, kewajiban pelaporan harta kekayaan bagi para pejabat yang rawan KKN serta upaya lain seperti pembentukan Unit Pengendalian Pungli dan Gratifikasi.” Ujar Iwan Santoso

Iwan Santoso juga menjelaskan bahwa Pedoman

Pengendalian Gratifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang gratifikasi, menguraikan proses pelaporan, aspek pencegahan dan penindakan, serta pengenalan Sistem Pengendalian Gratifikasi. Sehingga, diharapkan dapat membantu menyusun aturan internal dan menerapkan sistem pengendalian gratifikasi, termasuk diantaranya menyusun regulasi internal dan membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG).

“Saya juga berharap melalui penguatan Unit Pengendalian Pungli dan Gratifikasi

hari ini, dapat terbangun Budaya Anti Korupsi dan integritas yang tinggi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM” Tegas Iwan Santoso.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemberian materi oleh Amrullah selaku Jaksa Madya pada Kejaksaan Tinggi Lampung. Amrullah menjelaskan tentang Gratifikasi dimana terkait dengan pelaku gratifikasi terindikasi suap adalah ASN atau penyelenggara negara tidak bisa diterapkan kepada swasta sesuai dengan pasal 12B dan 12C diperuntukan bagi penerimaannya saja dan bukan pemberi gratifikasi. Namun demikian, Amrullah menjelaskan bahwa Pasal 12 C bisa terjadi jika Pidana gratifikasi hilang jika penerima gratifikasi tadi melaporkan penerimaan hadiah tersebut kepada KPK maka tindak pidana hilang.

Pemateri kedua, Tri Kusuma Dewi selaku jaksa Madya pada Kejaksaan Tinggi Lampung menjelaskan tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Tri Kusuma Dewi menjelaskan tu-



gas, fungsi dan wewenang dari Satgas Saber Pungli yaitu melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Tri Kusuma Dewi juga menjelaskan sasaran dari kegiatan saber pungli yaitu pada sector pelayanan public, ekspor dan impor, penegakan hukum, perizinan, kepegawaian, Pendidikan, pengadaan barang dan jasa, serta kegiatan pungli lainnya yang meresahkan masyarakat.

Materi Terakhir diberikan oleh Slamet Iman Santoso selaku Kepala Bagian Sistem Informasi Pengawasan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Iman Santoso menjelaskan bahwa dalam pembangunan Zona Integritas menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) memiliki fungsi untuk peningkatan pelayanan public dan bebas dari KKN. Untuk itu Penguatan Pengawasan memiliki indicator yang harus dibangun Pengendalian gratifikasi, Penerapan SPIP, Pengaduan masyarakat, Whistle Blowing System, dan Penanganan Benturan Kepentingan. Untuk itu Iman Santoso mengingatkan kepada seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Lampung untuk membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi serta melaporkan segala bentuk gratifikasi secara elektronik melalui upg.kemenkumham.go.id. Acara diakhiri dengan sesi tanya jawab yang dilakukan oleh narasumber dan peserta pada masing-masing sesi. •

“ Iman Santoso menjelaskan bahwa dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) memiliki fungsi untuk peningkatan pelayanan public dan bebas dari KKN. Untuk itu Penguatan Pengawasan memiliki indicator yang harus dibangun Pengendalian gratifikasi, Penerapan SPIP, Pengaduan masyarakat, Whistle Blowing System, dan Penanganan Benturan Kepentingan ”





Kadivim Pimpin Operasi Gabungan TIMPORA Bersama Korem 043 Gatam, BIN, Polda Lampung, dan Kejati Lampung

Rabu (15/09/2021) Dalam rangka peningkatan penegakan hukum Keimigrasian, Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, Is Edy Ekoputranto didampingi dengan Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan, Informasi dan Sarana Keimigrasian, Raden Ayu Fatimah, Kepala Bi-

dang Perizinan dan Informasi Keimigrasian, dan Para Pejabat Struktural dan Pelaksana melakukan operasi gabungan dengan stakeholder terkait yaitu Kepala Seksi Intel Korem 043 Garuda Hitam, Badan Intelijen Negara (BIN), Kepala Sub Direktorat Kamneg Kepolisian Daerah Lampung serta Kepala Seksi Idiepol Kejaksaan Tinggi Lampung.

Memimpin langsung Operasi Gabungan dengan target operasi yang terletak di Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Is Eko menyampaikan agar menghindari hal-hal yang berdampak tidak baik ke depannya dan beliau menyampaikan agar selalu mematuhi Protokol Kesehatan.

Perlu diketahui, Operasi gabungan ini merupakan bentuk untuk penegakan hukum keimigrasian. Diharapkan dalam pelaksanaan untuk penegakan hukum tersebut dilaksanakan dengan humanis, persuasif dan bijaksana. •





Gelar Safari Paten, Kanwil Kemenkumham Lampung Jadi Penutup Perjalanan DJKI

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan Rangkaian Kegiatan Safari Paten. Dimulai dari Semarang, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Malang, dan Palembang, Sekarang berada di Provinsi Lampung tepatnya di Kota Bandar Lampung. Kamis (16/09/2021)

Bertempat di Swiss Bell Hotel, Kegiatan Safari Paten yang mengusung Tema "Implementasi Perjanjian Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi/Kementerian/Lembaga" turut menghadirkan para peserta yang terdiri dari Sentra Kekayaan Intelektual dari Universitas di Provinsi Lampung, Instansi Pemerintahan seperti Dinas Pertanian dan Perkebunan, BPSDM dan para Pelaku Usaha dan UMKM.

Dalam Laporan Kegiatan yang disampaikan oleh Kasubdit Kerja Sama Luar Negeri DJKI, Fajar Sulaeman

menyatakan bahwa kegiatan ini terselenggara berkat kerja sama dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Lampung.

Memberikan Sambutan, Plt. Kepala Kantor Wilayah, Iwan Santoso yang hadir didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan, Kepala Divisi Pemasarakatan, Farid Juanaedi, dan Kepala Divisi Keimigrasian, Is Edy Ekoputranto, menyampaikan bahwa Provinsi Lampung merupakan Provinsi yang kaya akan Kekayaan Intelektual terutama dari Indikasi Geografis. Untuk itu Iwan Santoso berharap dengan adanya Kegiatan Safari Paten yang diselenggarakan oleh DJKI Ke-





Kasubdit Kerja Sama Luar Negeri DJKI, Fajar Sulaeman T. menyatakan bahwa kegiatan ini terselenggara berkat kerja sama dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Lampung.

menkumham dapat memberikan hasil yang positif dengan adanya peningkatan permohonan pendaftaran dalam hal Kekayaan Intelektual.

Membuka secara resmi kegiatan, Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, Dede Mia Yusanti mengajak seluruh peserta yang hadir untuk terus menggali potensi inovasi yang memiliki, terus berkreasi, dan berkarya, bersama-sama memahami pentingnya perlindungan paten dengan mendaftarkan permohonannya, kemudian menjaga kualitasnya, mengembangkannya dan membuatnya semakin bernilai ekonomi tinggi.

“Inovasi adalah motor perkembangan ekonomi yang berkesinambungan. Sejalan dengan perkembangan fenomena global yang terjadi, inovasi-inovasi yang bersifat individual pun mulai mengalami perubahan, bergeser ke inovasi yang melibatkan network dan kolaborasi”, Ujar Dede

“Inovasi adalah motor perkembangan ekonomi yang berkesinambungan. Sejalan de-

ngan perkembangan fenomena global yang terjadi, inovasi-inovasi yang bersifat individual pun mulai mengalami



perubahan, bergeser ke inovasi yang melibatkan network dan kolaborasi”, Ujar Dede

Dede menambahkan bahwa peran aktif berbagai pihak, yaitu Kementerian/Lembaga terkait, dunia usaha, dan penelitian dalam memahami dan memanfaatkan paten sangat dibutuhkan untuk mengantarkan Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Harapannya lembaga litbang bisa terus berinovasi serta bersinergi dengan dunia industri, untuk menjalankan penelitian yang mampu menjawab kebutuhan pasar.

Selain diseminasi paten dengan narasumber dari Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, kegiatan Safari Paten ini juga mengadakan mediasi dan draf-

ting paten. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman tentang tata cara pendaftaran, manfaat perlindungan, dan teknik penulisan/ drafting paten sehingga dapat mendorong para inventor dalam mengajukan permohonan paten serta meningkatkan permohonan paten dalam negeri. DJKI terus mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran kekayaan intelektual termasuk paten. Pelindungan kekayaan intelektual diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kreativitas, dan inovasi untuk berkembang, berkreasi, dan memberikan yang terbaik pada dirinya menuju Indonesia yang berdikari secara ekonomi. •

DJKI terus mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran kekayaan intelektual termasuk paten. Pelindungan kekayaan intelektual diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kreativitas, dan inovasi untuk berkembang, berkreasi, dan memberikan yang terbaik pada dirinya menuju Indonesia yang berdikari secara ekonomi.





Jelang Pelaksanaan CAT BKN, Plt. Kakanwil Lampung Lakukan Koordinasi dengan Polda dan UPT BKN

Dalam rangka persiapan pelaksanaan CAT Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2021, Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung melakukan koordinasi dengan Polda dan UPT BKN Lampung pada hari ini, Kamis (16/09/2021)



Koordinasi pertama dilakukan dengan mengunjungi Kantor Polda Lampung, Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Iwan Santoso didampingi oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Farid Junaedi; dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan yang disambut langsung oleh Kapolda Lampung, Irjen Pol Hendro Sugiatno beser-

ta jajarannya. Kegiatan koordinasi dilanjutkan dengan mengunjungi UPT BKN Bandar Lampung.

Pada kesempatan ini, Iwan Santoso menyampaikan bahwa jumlah peserta SKD CPNS Kemenkumham Lampung mencapai 13.784. CAT yang rencananya dimulai pada hari Selasa (28/09/2021) ini akan digelar di

Gedung Graha Wangsa Lampung.

Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dapat bekerjasama dan bersinergi dengan instansi tersebut untuk mensukseskan terlaksananya CAT SKD CPNS Tahun 2021. •



SKD Penerimaan CPNS di Lingkungan Kemenkumham Lampung TA. 2021 Resmi digelar

Seleksi Kompetensi Dasar berbasis Computer Assisted Test (CAT) bagi Peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung TA. 2021 resmi digelar. Selasa (28/09/2021) pada hari ini, dari 600 peserta di Sesi I 491 peserta mengikuti ujian dan 109 peserta tidak hadir dengan nilai tertinggi 469 (TWK 115 TIU 150 TKP 204). Sesi II 511 peserta mengikuti ujian dan 89 peserta tidak hadir dengan nilai tertinggi 465 (TWK 100 TIU 165 TKP 200). Sesi III 474 peserta mengikuti ujian 126 peserta tidak hadir dengan nilai tertinggi 450 (TWK 105 TIU 155 TKP 190).



Kegiatan SKD ini akan dilaksanakan selama 8 (delapan) hari pada tanggal 28 September 2021 hingga 05 Oktober 2021. Dari 13.784 peserta SKD dengan Kualifikasi Pendidikan Non-SLTA sebanyak 1.050 peserta dan SLTA sebanyak 12.734 peserta. Para peserta ini nantinya akan diterima sebanyak 55 Pria dan 4 Wanita.

Sebelum memasuki Ruangan Tes SKD para peserta telah menjalani serangkaian proses pemeriksaan yaitu pemeriksaan Surat Deklarasi Kesehatan, surat tes rapid antigen atau swab dengan hasil negative atau non reaktif, dan pengecekan suhu, dilanjutkan dengan pemeriksaan dokumen dengan memperlihatkan KTP pada masing-masing peserta, melakukan penitipan barang-barang agar memastikan barang yang dibawa di ruangan hanya kartu ujian, KTP serta pensil, selanjutnya penggeledahan badan, dan pemberian PIN ujian, sebelum memasuki ruangan para peserta

menunggu di area steril sambil diperlihatkan tata tertib ujian di dalam ruangan.

Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Heni Susila Wardoyo turut hadir dalam pembukaan kegiatan Tes SKD di Lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah, Iwan Santoso yang didampingi dengan Kepala Divisi Administrasi, Ida Asep Somara; Kepala Divisi Pemasaryakatan, Farid Junaedi; Kepala Divisi Keimigrasian, Is Edy Ekoputranto; Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan; serta Kepala Bagian Umum, Hadiyanto.

Pada kesempatan ini, Plt. Kepala Kantor Wilayah dalam sambutannya menyampaikan agar para peserta fokus dan percaya pada kemampuan diri sendiri. "Jangan percaya dengan pihak-pihak manapun yang menawarkan untuk kelu-

"Pada kesempatan ini, Plt. Kepala Kantor Wilayah dalam sambutannya menyampaikan agar para peserta fokus dan percaya pada kemampuan diri sendiri. "Jangan percaya dengan pihak-pihak manapun yang menawarkan untuk kelulusan, semuanya HOAX" tegas Iwan

lusan, semuanya HOAX" tegas Iwan

Menyemangati para peserta, "Semoga sukses dalam Tes SKD dan bisa bergabung menjadi bagian dari Keluarga Besar Kementerian Hukum dan HAM" ujar Iwan

Selanjutnya perwakilan dari Badan





Pemeriksaan identitas dan kartu ujian peserta oleh Panitia



Pemeriksaan peserta menggunakan metal detector oleh Panitia Seleksi CPNS Kemenkumham 2021

Kepegawai Negara menyampaikan untuk selalu senantiasa berdoa sebelum memulai ujian serta berusaha dengan semaksimal mungkin.

Sebagai Informasi, Pada Kegiatan SKD ini dibagi menjadi 3 (tiga) sesi perharinya dimana pelaksanaan waktu ujian pada Sesi

I jam 08.00 s.d. 09.50, Sesi II jam 11.00 s.d. 12.50, Sesi III jam 14.00 s.d. 15.50 dengan soal sebanyak 110 dan waktu 100 menit. Untuk ambang batas nilai yang ditetapkan yaitu untuk TWK: 65, TIU: 80, TKP: 165 dengan total kumulatif: 331. •





Hari Terakhir Pelaksanaan, Walikota Cek Langsung SKD CAT Kemenkumham TA. 2021

Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis Computer Assisted Test (CAT) bagi Peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung TA. 2021 telah memasuki hari kedelapan yang menandakan telah berakhir. Selasa (05/10/2021)



Iwan Santoso berpesan kepada peserta SKD untuk percaya diri



Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana memberikan pertanyaan kepada peserta tes SKD

Di hari terakhir ini, Plt. Kepala Kantor Wilayah, Iwan Santoso melakukan apel pagi bersama seluruh Panitia Daerah sebelum rangkaian Kegiatan SKD dimulai yang bertempat di area Lapangan Parkir Graha Wangsa. Iwan mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jajaran panitia daerah yang telah mengemban Amanah yang diberikan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Iwan berharap kedepannya agar seluruh panitia dapat terus memegang tanggung jawab serta selalu memberikan pelayanan yang humanis.

Selanjutnya sebelum pelaksanaan Sesi II dimulai, Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana hadir untuk melihat secara langsung pelaksanaan Kegiatan SKD CAT di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Didampingi oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah, Iwan Santoso dan Koordinator dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), dalam sambutan yang diberikan, eva menyampaikan kepada para peserta untuk tetap semangat, lakukan yang terbaik.

"Apapun hasilnya kalian telah berjuang, jangan kecewa dan berputus asa, masa depan kalian masih Panjang" Ujar Eva memberikan semangat.

Iwan juga menyampaikan beberapa hal yang harus ditanamkan dalam mindset para peserta SKD bahwa jangan percaya

kepada siapapun yang menjanjikan kelulusan, hanya 3 (tiga) yang dapat memberikan kelulusan.

"Hanya diri sendiri, Doa Orang tua, dan Allah subhanahu wa ta'ala" tegas iwan.

Sebelum meninggalkan Ruang SKD CAT, Eva memberikan 3 (tiga) pertanyaan kepada 2 (dua) peserta 1 (satu) panitia untuk membagikan hadiah 1 (satu) buah sepeda dari Pemerintah Kota Bandar Lampung. •

“

“Apapun hasilnya kalian telah berjuang, jangan kecewa dan berputus asa, masa depan kalian masih Panjang” Ujar Eva memberikan semangat.

”





Plt. Kakanwil Hadiri Ikrar Sumpah Setia WBP Eks Teroris Kepada NKRI dan Deklarasi BERSINAR Lapas Kelas I Bandar Lampung

Plt Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Iwan Santoso hadirinya pernyataan ikrar sumpah setia WBP Eks Teroris kepada NKRI dan Deklarasi Bersih Narkoba (BERSINAR) di Lapas Kelas I Bandar Lampung pada hari ini, Selasa (28/09/2021).

Turut hadir dalam acara ini adalah Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Heni Susila Wardoyo; Plt. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM, Ida Asep Somara; Rektor Universitas Sang Bumi Ruwai Jurai, Lina Maulidiyana; Seluruh Kepala Divisi di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Lampung; Kepala BIN Daerah Lampung, Bpk. Iwan Satriawan; Kepala BNN Provinsi Lampung, Brigjen Edi Suwasono; Kasrem 403; Kepala Satuan Tugas Wilayah Densus 88 Lampung; Sekda Kota Bandar Lampung; Dir. Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Lampung; Dir. Intelijen Keamanan Polda Lampung; Dir. Reserse

Narkoba Polda Lampung; Kepala Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Komandan Kodim 0410/KBL, dan Seluruh Kepala UPT Pemasayarakatan Kemenkumham yang berada di wilayah Bandar Lampung;

Pada kesempatan ini, Plt. Kakanwil Lampung memberikan apresiasi kepada Lapas Kelas I Bandar Lampung yang sudah menginisiasi acara ini dan berharap akan menjadi role model bagi UPT Pemasayarakatan lainnya di lingkungan Kanwil Kemenkumham Lampung. •



Foto bersama dengan Narapidana Eks Teroris sesudah ikrar sumpah setia kepada NKRI



penandatanganan Pakta Integritas oleh Kalapas I Bandar Lampung, Maizar yang disaksikan oleh Kepala BNNP, Plt. Kakanwil Kemenkumham Lampung, dan Kepala Divisi Pemasayaran

Acara diawali dengan kegiatan Penyataan Ikrar Sumpah Setia kepada NKRI yang dilanjutkan dengan prosesi Penandatanganan Naskah Ikrar dengan saksi-saksi. WBP Eks Teroris yang menyatakan ikrar sumpah setia ini berjumlah 4 orang yaitu Yudhistira bin Ahmad Rifai, Muhammad Rifki Montazeri bin Abdul Gofur, Indra Utama bin Rohadi Amin, dan Awal Septi Hadi

bin M. Zaenudin. Acara kemudian dilanjutkan dengan proses penciuman bendera Sang Merah Putih oleh para WBP.

Kegiatan dilanjutkan dengan Deklarasi BERSINAR yang ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh Kepala Lapas Kelas I Bandar Lampung, Maizar yang disaksikan oleh Kepala BNNP, Plt.

**“
Penyataan Ikrar Sumpah Setia kepada NKRI yang dilanjutkan dengan prosesi Penandatanganan Naskah Ikrar dengan saksi-saksi. WBP Eks Teroris yang menyatakan ikrar sumpah setia ini berjumlah 4 orang
”**

Kakanwil Kemenkumham Lampung, dan Kepala Divisi Pemasayaran. Kegiatan ini ditutup dengan penandatanganan Perjanjian Teknis Kerja Sama antara LP Kelas I Bandar Lampung dan Universitas Sang Bumi Ruwai Jurai. •



Divisi Pemasyarakatan Kanwil Lampung Gelar Koordinasi DILKUMJAKPOL Plus

Bertempat di Novhotel Bandar Lampung, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung gelar koordinasi antar penegak hukum (DILKUMJAKPOL) Provinsi Lampung Plus pada hari ini, Rabu (29/09/2021). Disebut plus karena dalam acara ini turut mengundang instansi terkait selain penegak hukum yang dapat mendukung kinerja penegak hukum.

Kegiatan dibuka oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Iwan Santoso. Hadir sebagai narasumber yaitu Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Kepolisian Daerah Lampung, Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung. Turut hadir mendampingi Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Farid Junaedi dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan. Sebagai peserta adalah seluruh Kepala UPT Pemasyarakatan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung. •

"Layaknya intelijen, ia harus mampu memprediksi kendala yang mungkin terjadi di lingkungan tempat ia bekerja sehingga mampu menyiapkan strategi yang harus dilakukan apabila kemungkinan terburuk terjadi," ujar iwan



Penandatanganan Deklarasi Zero Handphone pada seluruh UPT Pemasyarakatan oleh kepala BNN sebagai saksi

Dalam sambutannya, Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung menyampaikan bahwa setiap petugas Pemasyarakatan, khususnya Kepala UPT, harus mampu mendeteksi dini setiap kendala yang mungkin akan terjadi di unit tempat ia bekerja.

"Layaknya telijen, ia harus

mampu memprediksi kendala yang mungkin terjadi di lingkungan tempat ia bekerja sehingga mampu menyiapkan strategi yang harus dilakukan apabila kemungkinan terburuk terjadi" Ujar Iwan. Selain itu, Plt Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung juga berharap dengan adanya acara ini maka sinergitas antar sesama petugas, sesama instansi, ataupun aparat penegak hukum dan stakeholder pendukung setiap kinerja pembinaan dan pelayanan penyelenggaraan Pemasyarakatan dapat terjalin dengan baik serta dapat membangun sinergi juga dengan media informasi publik.

Pada kesempatan ini, dilaku-

Pada kesempatan ini, dilakukan pula penandatanganan Deklarasi Zero Handphone pada Seluruh UPT Pemasyarakatan dengan di sahkan oleh para saksi. Deklarasi ini sebagai bentuk komitmen dan langkah pencegahan penyalahgunaan handphone di lingkungan UPT Pemasyarakatan.

kan pula penandatanganan Deklarasi Zero Handphone pada Seluruh UPT Pemasyarakatan dengan di sahkan oleh para saksi. Deklarasi ini sebagai bentuk komitmen dan langkah pencegahan penyalahgunaan handphone di lingkungan UPT Pemasyarakatan. Setelah penandatanganan Deklarasi Zero





Foto bersama se usai acara Dilkumjakpol dilaksanakan



Diskusi Panel yang dipimpin oleh Plt. Kakanwil Kemenkumham Lampung, Iwan santoso

Handphone ini, acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber dan open discussion.

Kegiatan dilanjutkan dengan panel diskusi antara Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Gubernur Lampung, Ketua DPRD Provinsi Lampung, Kepala Kepolisian Daerah Lampung, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Kepala BIN Daerah Lampung, Kepala BNN Provinsi Lampung, dan Komandan Korem 403/ Gatam

yang diwakili oleh Kasrem Gatam. Diskusi panel ini dilakukan untuk meningkatkan sinergitas dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi antar instansi.

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai sarana untuk saling meningkatkan sinergitas antar aparaturnya penegak hukum dan instansi terkait di tingkat wilayah dalam meng-explore permasalahan-permasalahan yang ada. Selain itu, pada kegiatan ini dilakukan pula Evaluasi terhadap upaya yang telah dilakukan serta

mencari solusi atas permasalahan tersebut dengan mendorong Penguatan peran dan fungsi lembaga penegak hukum yang terganggu dalam forum DILKUMJAKPOL serta lembaga lainnya dalam upaya penanganan over crowded serta pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat terwujudnya koordinasi, kerjasama dan sinkronisasi ketatalaksanaan sistem peradilan pidana secara optimal serta pelibatan/dukungan instansi terkait dalam rangka penyelesaian permasalahan dan isu-isu aktual. •

“ Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat terwujudnya koordinasi, kerjasama dan sinkronisasi ketatalaksanaan sistem peradilan pidana secara optimal serta pelibatan/dukungan instansi terkait dalam rangka penyelesaian permasalahan dan isu-isu aktual. ”



Kanwil Lampung Gelar Harmonisasi Raperbup Kabupaten Tulang Bawang Barat Tentang Pemberian Insentif Pengelola BMN

LAMPUNG_INFO - Ber-tempat di Ruang Legal Drafter, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung gelar harmonisasi Raperbup Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan kepada Pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Bagian Hukum Setdakab Tulang Bawang Barat pada hari ini, Rabu (29/09/2021).

Kegiatan ini dibuka dan dipimpin oleh Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Lampung, Rugun Tresia Pakpahan.

Turut hadir dalam acara ini yaitu Kepala Bagian Hukum Kabupaten Tulang Bawang Barat, Budi Sugianto; Kepala Subbidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah, Masriakromi; Kasubbag Perundang-undangan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Novriadi; Staf Subbag Perundang-undangan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Angga Oktora; dan 5 (Lima) Anggota Tim Zonasi Kabupaten Lampung Barat yang terdiri dari fungsional perancang peraturan perundang-undangan ahli Madya, Dina M Sirait dan fungsional perancang peraturan perundang-undangan ahli Muda yaitu Gunawan; Herliana Husein, Eliyani, dan Priska PN Sidabutar yang membahas mengenai Raperbup Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan kepada Pejabat atau pegawai yang melaksanakan

pengelolaan Barang Milik Daerah. Raperbup ini merupakan raperbup inisiatif dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang telah dibuat kajian hukumnya. Raperbup ini juga telah memiliki Naskah Akademik sebagai bahan harmonisasi untuk Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung.

Hasil Rapat Harmonisasi oleh Tim Zonasi nantinya akan dirapatkan kembali untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, dan akan dikirim melalui email kepada Bagian Hukum Kabupaten Tulang Bawang Barat, Harmonisasi ini dilaksanakan guna terbentuknya peraturan kepala daerah yang baik dan meminimalisir terjadinya disharmonisasi. •



Kanwil Lampung Gelar Bimtek Perancangan Peraturan Daerah Tahun 2021

LAMPUNG_INFO - Ber-
tempat di Ruang Legal
Drafter, Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM
Lampung gelar harmonisasi
Raperbup Kabupaten Tulang
Bawang Barat tentang Pember-
ian Insentif dan/atau Tunjang-
an kepada Pejabat atau pegawai
yang melaksanakan pengelolan
Barang Milik Daerah dengan
Bagian Hukum Setdakab Tu-
lang Bawang Barat pada hari
ini, Rabu (29/09/2021).

Bertempat di Ballroom Hotel
Golden Tulip Bandar Lampung,
Kantor Wilayah Kementerian Hu-
kum dan HAM Lampung melak-
sanakan Bimbingan Teknis Pe-

rancang Peraturan Daerah
Tahun 2021 yang dihadiri
oleh Kepala Divisi Pelaya-
nan Hukum dan HAM :
Nur Ichwan, Kepala Bi-
dang Hukum : Rugun
Tresia Oktavianti Pakpa-
han, Kepala Bidang Pelaya-
nan Hukum : Ignatius
Mangantar Tua Silalahi,
Kepala Bidang
Perizinan dan
Informasi Keimi-
grasian : Imam
Santoso, Kepala
Sub Bi-
dang
Fasi-
litas

Pembentukan
Produk Hu-
kum Daerah
: Masriakro-
mi beserta
33 Peserta
yang hadir
ditempat.
Kegiatan ini
mengun-
dang





Sesi diskusi dalam Bimbingan Teknis Perancangan Peraturan Daerah Tahun 2021

narasumber yaitu Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Nuryanti Widyastuti dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia secara daring, Kamis (30/09).

Dalam laporannya Kepala Bidang Hukum, Rugun Tresia Oktavianti Pakpahan menyampaikan bahwa seluruh peserta tersebut terdiri dari 26 Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dan 7

peserta Biro Hukum dan Bagian Hukum Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Berlanjut dengan sambutan Plt.Kepala Kantor Wilayah Lampung yang diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan menyatakan Bimbingan Teknis Perancang Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada kita semua mengenai perlunya peningkatan kemampuan dan pemahaman perancang perundang-undangan atas kewajiban dan perannya dalam rangka peningkatan kualitas produk hukum di daerah. Menutup sambutan-

“Setiap perancang peraturan perundang-undangan harus memiliki pemahaman yang mendalam dan mengimplementasikan kewajiban dan perannya dalam menjalankan tugasnya sebagai perancang peraturan peraturan perundang-undangan khususnya dalam implementasi undang-undang Cipta kerja dalam produk hukum di daerah sehingga akan lahir suatu produk peraturan perundang-undangan yang baik, aspiratif dan responsive.” pungkas Ichwan

nya, Nur Ichwan berharap penyelenggaraan Bimbingan Teknis ini meningkatkan sinergitas antara pemerintah daerah dalam pembentukan sebuah peraturan daerah baik secara kuantitas maupun kualitasnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan oleh narasumber terkait dengan tata pelaksanaan pengharmonisasian peraturan daerah yang tutup dengan sesi tanya jawab. •





Kanwil Lampung Gelar Koordinasi Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM dan Kabupaten/Kota Peduli HAM

LAMPUNG_INFO - Ber-tempat di Ruang Legal Drafter, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung gelar koordinasi pelaporan capaian pelaksanaan Aksi HAM B04, B08 dan Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2021 pada hari ini, Kamis(30/09/2021).



Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan mewakili Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung yang didampingi oleh Kepala Bidang HAM, Rina Anggraeny dan Kasubid Pemajuan HAM, Ferrie Irza Irawan. Hadir sebagai narasumber Kasubbag Non litigasi dan Ham Biro Hukum Pemerintah Provinsi Lampung, Yusnili serta narasumber dari Direktorat Jendral Kerjasama HAM yaitu Kasubdit KDN dan RANHAM I, Ruth Marshinta Sarumpaet; Kepala Seksi Kerjasama dan RANHAM IB, Fransisca Mirna Widyaningtyas; dan Konsultan RANHAM, Revienda Anita.

Dalam sambutannya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menyampaikan bahwa dengan adanya kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta dapat mengikuti dengan sungguh-sungguh serta berpartisipasi aktif dengan sebaik-baiknya. Selain itu, Nur Ichwan juga berharap semoga Capaian Pelaporan Pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung memperoleh hasil yang maksimal (berwarna hijau). Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari masing-masing narasumber serta diskusi tanya-jawab dengan peserta.

Komitmen kuat pemerintah dalam Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan dan Pemajuan HAM (P5HAM) di Indonesia telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025. RANHAM merupakan pedoman bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi Aksi HAM. Melalui terlaksanakannya aksi HAM RANHAM dapat diimplementasikan dengan lebih baik. •



Plt. Kakanwil Dampingi Deputi III KSP dalam Kunjungan Kerja di Provinsi Lampung

Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Iwan Santoso dampingi Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP), Panutan S. Sulendrakusuma di Provinsi Lampung dalam rangka pembinaan ketahanan pangan di Kabupaten Tanggamus pada hari ini, Kamis (23/09/2021).



Pada kunjungan kerja ini, Deputi III KSP didampingi oleh Asisten Deputi Prasarana dan Saran Pangan dan Agribisnis, Ismariny; Tenaga Ahli Utama, Bustanul Arif; dan Tenaga Ahli Utama, Aji Erlangga. Tim KSP tiba di Bandar Lampung pada hari Rabu (22/09/2021), yang kemudian bersama dengan Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung menghadiri pengukuhan dan orasi ilmiah 15 profesor Universitas Lampung serta penganugrahan Rekor MURI.



Tim KSP menghadiri pengukuhan dan orasi ilmiah 15 profesor Universitas Lampung serta penganugrahan Rekor MURI.

Pada hari ke dua di Provinsi Lampung, Tim KSP sempat singgah di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung sebelum bertolak ke Kabupaten Tanggamus untuk melakukan



Tim KSP bertolak ke Kabupaten Tanggamus untuk melakukan pembinaan ketahanan pangan

pembinaan ketahanan pangan. Turut hadir dalam acara ini yaitu Bupati tanggamus, Dewi Handayani dan perwakilan dari Sekretariat Daerah, Hamid. H Lubis.

Dalam sambutannya, Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung menyampaikan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung menyampaikan

bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung akan terus mendukung pengelolaan kekayaan alam dan hasil seni di Kabupaten Tanggamus. Untuk itu, Kanwil Lampung juga turut mensosialisasikan layanan masyarakat terkait KI khususnya pendaftaran indikasi geografis Merk dan Paten serta layanan legalitas lainnya. Selain itu, Kanwil Lampung juga akan terus mendu-

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung akan terus mendukung pengelolaan kekayaan alam dan hasil seni di Kabupaten Tanggamus. Untuk itu, Kanwil Lampung juga turut mensosialisasikan layanan masyarakat terkait KI khususnya pendaftaran indikasi geografis Merk dan Paten serta layanan legalitas lainnya.

kung Pemerintah Daerah dengan harmonisasi peraturan daerah. Acara dilanjutkan dengan Diskusi dengan Kelompok Tani terkait Subsidi Pupuk, Korporatisasi Petani Klaster Pertanian Pisang, dan Pengembangan Budidaya Padi Biofortifikasi. •



Plt. Kakanwil Tinjau Pelayanan Keimigrasian di Bandara Internasional Radin Inten II

LAMPUNG_INFO – Dalam rangka Monitoring Pelayanan Keimigrasian di Bandar Udara Internasional Radin Inten II, Plt. Kepala Kantor Wilayah, Iwan Santoso didampingi dengan Kepala Divisi Keimigrasian, Is Edy Ekoputranto dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung, Agung Prianto melakukan kunjungan kerja. Rabu (22/09/2021)



Disela-sela kegiatan monitoring, Iwan Santoso berpesan untuk para jajarannya yang berada di bandara Radin Inten II untuk selalu siaga dan berwaspada dalam bertugas. Selain itu Iwan Santoso juga meninjau secara langsung terkait dengan tempat, sarana dan prasarana yang berada di Bandar Radin Inten II. Iwan berharap dengan segala fasilitas yang ada di Bandara Radin Inten

II, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung khususnya Divisi Keimigrasian dapat selalu meningkatkan kualitas pelayanan Keimigrasian dengan tetap mematuhi standar operasional yang telah ditetapkan. •



Dialog Interaktif di Radar TV, Kemenkumham dan Dinas Pariwisata Provinsi Lampung Bahas KIK dan WBTB

Bidang Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Lampung bekerjasama dengan Radar TV menggelar dialog interaktif dengan mengusung tema "Mari Jaga Kekayaan Intelektual Komunal di Provinsi Lampung". Kamis (23/9). Dialog Interaktif tersebut merupakan salah satu upaya untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat, khususnya mengenai kekayaan intelektual komunal

Narasumber dalam dialog interaktif adalah Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Madya, Muhammad Zuhri dan Kepala Seksi Pengembangan Segmen Pasar

Pariwisata, Indra Jamal Nur dipandu oleh host Radar TV, Vyo-na Dewi. Kegiatan ini juga digelar secara Live on di Kanal youtube Radar Lampung TV.

Dalam penyampaian, Zuhri menyampaikan bahwa pentingnya pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal adalah untuk mencegah kerugian material dan moral secara langsung yang diderita oleh masyarakat adat. Pemanfaatan KIK secara ilegal juga dapat menimbulkan persoalan lain yang tidak kalah serius bagi kelangsungan kehidupan masyarakat adat dan umat manusia secara umum.

Zuhri juga menjelaskan tentang manfaat ekonomis yang dirasakan dengan didaftarkan Kekayaan Intelektual Komunal yaitu mendapatkan perlindungan hukum, Pelindungan Kekayaan

“ Zuhri menyampaikan bahwa pentingnya pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal adalah untuk mencegah kerugian material dan moral secara langsung yang diderita oleh masyarakat adat. Pemanfaatan KIK secara ilegal juga dapat menimbulkan persoalan lain yang tidak kalah serius bagi kelangsungan kehidupan masyarakat adat dan umat manusia secara umum. ”

Intelektual Komunal menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional ke depan dan berkontribusi secara signifikan dalam

perkembangan perekonomian nasional maupun internasional sehingga dapat menambah nilai ekonomis suatu kebudayaan karena lebih dikenal baik di lingkup nasional maupun internasional.

Dengan adanya kegiatan sosialisasi seperti ini, harapannya Pemerintah Daerah dan Masyarakat bisa bersama-sama melindungi Kekayaan Intelektual Komunal Provinsi Lampung dengan mendaftarkan pencatatannya melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dan jadikan KIK ini sebagai kebanggaan bersama Provinsi Lampung.

Sementara dan Kepala Seksi Pengembangan Segmen Pasar Pariwisata, Indra Jamal Nur menyampaikan bahwa ada beberapa



Kepala Seksi Pengembangan Segmen Pasar Pariwisata, Indra Jamal Nur menyampaikan ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan tradisional adalah menjadi kewenangan Pemprov Lampung,



hal upaya untuk didaftarkan atau ditetapkan maka ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan tradisional adalah juga menjadi kewenangan pemerintah daerah Provinsi Lampung, yaitu disebut Warisan Budaya Tak Benda yang sejak tahun 2013 hingga 2017 pendaftaran dan penetapan WBTB dilaksanakan oleh dinas pariwisata dan kebudayaan yang sekarang menjadi dinas pariwisata dan ekonomi kreatif provinsi Lampung.

Indra menjelaskan bahwa Sejak tahun 2013 hingga 2017 sudah ada enam belas karya budaya yang ditetapkan yaitu Tapis, Lamban Pesagi, Sigeh Penguten, Tari Melinting, Muayak, Gamolan, Sulam Usus, Sekura Cakak Buah, Gulai Taboh, Cakak Pepadun, Seruit, Tenun Ikat Inuh, Warahan Lampung, Kakiceran, Maduaro dan Topping, Lalu sejak 2017 hingga 2021 ada lebih dari 50 karya budaya yang telah ditetapkan.

Indra menjelaskan bahwa Sejak tahun 2013 hingga 2017 sudah ada enam belas karya budaya yang ditetapkan yaitu Tapis, Lamban Pesagi, Sigeh Penguten, Tari Melinting, Muayak, Gamolan, Sulam Usus, Sekura Cakak Buah, Gulai Taboh, Cakak Pepadun, Seruit, Tenun Ikat Inuh, Warahan Lampung, Kakiceran, Maduaro dan Topping, Lalu sejak 2017 hingga 2021 ada lebih dari 50 karya budaya yang telah ditetapkan.

Indrapun berharap kedepannya dapat bersinergi antara kumham Lampung dan pemerintah provinsi Lampung bersama-sama masyarakat, budayawan, akademisi, untuk sama sama menetapkan karya budaya Lampung ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dunia dari Lampung.



Hadirkan Pakar Kesehatan Kejiwaan Provinsi Lampung, Bidang Hak Asasi Manusia Kemenkumham Lampung Kaji Pelanggaran HAM terhadap ODGJ

LAMPUNG – Pada Senin (27/09/21), bertempat di Ruang Legal Drafter, dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan, Bidang Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung menggelar pengolahan dan analisis data SIPKUMHAM terkait peristiwa dugaan pemerkosaan orang dengan gangguan jiwa di Bandar Lampung yang terjadi di Tugu Durian, Jalan Raden Imba Kusuma, Tanjungkarang Barat. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Bidang HAM; Kepala Sub Bidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM; Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM; JFT Perancang Peraturan Perundangan dan Perwakilan Biro Hukum Pemprov Lampung.



Psikiatri Konsultan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung, dr. Tendry Septa, SpKJ(K) memberikan penjelasan terkait ODGJ

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan menggarbarkan tentang pentingnya kasus pelanggaran HAM ini karena Anggota Komisi III DPR, Taufik Basari, ikut menyoroti kasus ini lantaran pelaku masih belum tertangkap. Seperti yang diliput oleh media, menurut Taufik kasus pemerkosaan terhadap ODGJ tersebut harus terungkap sebagai bentuk perlindungan negara kepada semua warga. Nur Ichwan mene-

kankan bahwa hukuman pidana bagi pelaku adalah lebih berat jika korbannya merupakan ODGJ.

Psikiatri Konsultan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung, dr. Tendry Septa, SpKJ(K), dihadirkan sebagai narasumber. Dalam kesempatan memberikan keterangan ahli, dr. Tendry menjelaskan bahwa berdasarkan UU. KES. No. 36 Tahun 2009 definisi kesehatan adalah keadaan sehat baik

secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang yang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Berdasarkan UU Keswa No. 18 tahun 2014, sehat adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuannya, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.

Terkait gangguan kejiwaan dr. Tendry memaparkan tanda dan gejalanya, yakni:

- Gejala dan tanda gangguan mental tergantung pada jenis gangguan jiwa yang dialami.
- Penderita bisa mengalami gangguan pada suasana perasaan, pikiran, dan perilaku.
- Beberapa contoh tanda dan gejala gangguan jiwa adalah sebagai berikut :

- Waham atau delusi, yaitu meyakini sesuatu yang tidak nyata atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
- Halusinasi, yaitu sensasi ketika seseorang melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak nyata.
- Suasana hati yang berubah-ubah dalam periode-periode tertentu.
- Perasaan sedih yang berlangsung hingga berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan.
- Perasaan cemas dan takut yang berlebihan dan terus menerus, sampai mengganggu aktivitas sehari-hari.
- Gangguan makan misalnya merasa takut berat badan bertambah, cenderung memuntahkan makanan, atau makan dalam jumlah sangat sedikit.

Biro Hukum memberikan masukan untuk menghadirkan Dinas

“Psikiatri Konsultan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung, dr. Tendry Septa, SpKJ(K), dihadirkan sebagai narasumber. Dalam kesempatannya memberikan keterangan ahli, dr. Tendry menjelaskan bahwa berdasarkan UU. KES. No. 36 Tahun 2009 definisi kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang yang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.”

Sosial Provinsi Lampung dalam upaya penyelesaian. Menanggapi hal tersebut Tim SIPKUMHAM yang melaksanakan koordinasi di lapangan akan meningkatkan kerjasama antar satuan kerja, yakni dengan Dinas Sosial dan Polsek Tanjungkarang Barat. •





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH LAMPUNG



Memperingati
HARI KESAKTIAN
PANCASILA

1 Oktober 2021





7 KARAKTER PRIBADI AGUNG UNTUK MEWUJUDKAN KEAGUNGAN ORGANISASI

1. Bekerja dan berkarya dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT dan rakyat
2. Meyakini selalu diawasi Allah SWT dan menyadari bahwa jika berbuat baik pasti dibalas dengan kebaikan dan berbuat buruk pasti dibalas keburukan
3. Semangat belajar tiada akhir dan menciptakan beragam inovasi untuk kemudahan layanan
4. Hidup sederhana dengan *take home pay* yang halal
5. Mengeliminasi keserakahan terhadap kekuasaan dan harta
6. Merespon semua keberhasilan dengan syukur dan rendah hati
7. Menyikapi kegagalan dengan berfikir positif tentang hikmah sembari mencari solusi tepat



RAZILU

INSPEKTUR JENDERAL KEMENKUMHAM RI

AYO LAWAN COVID -19



IWAN SANTOSO

Pit. KAKANWIL KEMENKUMHAM LAMPUNG



Mencuci
Tangan



Memakai
Masker



Menjaga
Jarak



Menjauhi
Kerumunan



Mengurangi
Mobilitas



Menghindari
makan bersama

**TERAPKAN
PROTOKOL
KESEHATAN**

6M!